

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terkenal akan negara maritim sehingga salah satu cara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan yaitu dengan diperlukan adanya keseimbangan peran stakeholder dan keragaman hayati. Indonesia memiliki luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km² dimana 3,25 juta km² termasuk daerah lautan dan 2,55 juta km² adalah zona ekonomi eksklusif. Daerah daratan hanya seluas 2,01 juta km² (Pratama, 2020). Hal ini menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Berikut data daerah perairan Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2018 sampai tahun 2020.

Tabel 1. 1 Data Daerah Perairan di Indonesia

Jenis Konservasi Perairan	Jumlah Kawasan Koservasi Perairan		
	2018	2019	2020
Taman nasional Laut	4.043.541,3	4.043.51,3	3.968.975,3
Taman Wisata Alam Laut	491.248	491.248	491.248
Suaka Margasatwa Laut	5.400	5.400	5.400
Cagar Alam Laut	91.820	91.820	91.820
Taman Nasional Perairan	3.355.352,82	3.355.352,82	3.355.352,82
Suaka Alam Perairan	445.630	445.630	445.630
Taman Wisata Perairan	1.541.040,2	1.541.040,2	1.540.040,2
Kawasan Konversi Perairan Daerah	10.901.101,76	13.172.342,49	13.949.677,46

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Salah satu jenis tanaman perairan yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yaitu tanaman mangrove. Tanaman mangrove memiliki kegunaan khusus dimana akan berfungsi ekologis seperti dalam beradaptasi dengan lingkungan ekstrim (contohnya seperti kondisi tanah tergenang, kadar garam tinggi dan kondisi tanah yang kurang stabil), mencegah erosi, mencegah intrusi air laut ke tanah, produksi oksigen dan lainnya. Ekosistem mangrove merupakan gabungan dari komponen daratan dan lautan dimana yang saling hidup bergantung satu sama lain. Tanaman mangrove memiliki fungsi ekonomis ketika dapat dimanfaatkan kegunaannya seperti ekowisata dan akan berfungsi sosial dalam proses pemanfaatan yang dilakukan oleh stakeholder dan keseimbangan bagi ekosistem sekitar (Dinas Lingkungan Hidup, 2017).

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) populasi ekosistem tanaman mangrove di Indonesia seluas 3.311.207,45 Ha dan pada tahun 2021, diketahui bahwa total luas mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan populasi ekosistem mangrove di Indonesia sehingga berpeluang terhadap peningkatan penghasilan bagi masyarakat. Pemanfaatan ekosistem mangrove juga akan berdampak pada keberlanjutan secara biologi (Adnyana, 2020).

Peran pemerintah daerah sangat signifikan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan amanah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan penyelenggaraan pemerintahan daerah diorientasikan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Pentingnya keadilan lingkungan juga ditekankan oleh Ec Kersley, yang menyatakan bahwa

keberlanjutan lingkungan tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan lingkungan, terutama terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini khususnya harus memberikan peluang dan kontrol yang lebih besar kepada daerah, masyarakat lokal, dan petani untuk mengakses sumber daya alam seperti pertanahan, kehutanan, pertambangan, dan kelautan (Hendrasmo dkk., 2022).

Pada tahun 2009, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 yang mengatur Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah. Ekowisata didefinisikan dan dijelaskan prinsip-prinsip pengembangan ekowisata di daerah beserta regulasi terkaitnya. Prinsip-prinsip ini menjadi indikator pengembangan kawasan wisata dengan pendekatan *ecotourism*. *The International Ecotourism Society* (TIES) pada tahun 2015 merumuskan beberapa prinsip *ecotourism*, antara lain: 1) meminimalkan dampak fisik, sosial, perilaku, dan psikologis; 2) membangun kesadaran dan penghargaan terhadap lingkungan dan budaya; 3) memberikan pengalaman positif bagi wisatawan dan masyarakat lokal; 4) memberikan keuntungan finansial langsung untuk upaya konservasi; 5) menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat lokal dan pelaku industri wisata; 6) memberikan pengalaman interpretatif yang berkesan bagi wisatawan; 7) merancang, membangun, dan mengoperasikan fasilitas dengan dampak rendah; 8) memberikan pengakuan terhadap hak dan kepercayaan spiritual masyarakat asli serta melakukan kemitraan atau kerjasama dengan mereka untuk memberdayakan mereka (Santoso, 2017).

Pariwisata dijelaskan sebagai suatu sistem yang menyatukan permintaan pasar dengan daya tarik destinasi. *Green tourism* menekankan pada kapasitas, edukasi, pelestarian sumber daya lingkungan, pembangunan daerah, dan kegiatan khas daerah. Sebuah destinasi dapat disebut sebagai *green tourism* jika

memiliki empat dimensi utama, yaitu dasar alam, dukungan konservasi, keberkelanjutan, dan pendidikan lingkungan. *Green tourism* menciptakan ruang untuk wisatawan memahami dan menghargai keunikan alam dan budaya suatu destinasi. Implementasi konsep ini menuntut kerjasama antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat setempat, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Hasan, 2014).

Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak yang Ramah Lingkungan di Indonesia bertujuan mengajak mitra nasional untuk membangun industri kepariwisataan, sekaligus menciptakan pekerjaan yang bersahabat dengan lingkungan. Meskipun pembangunan berkelanjutan telah diakui dalam kerangka hukum, implementasinya belum selalu konsisten. Efektivitas berbagai kebijakan memerlukan koordinasi antara para pemangku kepentingan, serta pemberlakuan instrumen ekonomi dan hukum yang seimbang agar mendorong perubahan struktural dan budaya dalam pemerintahan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2012).

Salah satu destinasi yang menonjol adalah Lembung Pamekasan di Pulau Madura, Indonesia. Usaha untuk mengoptimalkan potensinya, diperlukan strategi pemasaran yang inovatif dan berkelanjutan atau disebut *green tourism*. Konsep *green tourism marketing* (GTM) merupakan konsep adopsi dari *ecological marketing*, atau *sustainable marketing*. *Green tourism marketing* melihat sudut pandang pemasaran dari sumber daya yang terbatas sehingga dapat memuaskan hasil yang didapat oleh konsumen dan mencapai tujuan organisasi dengan mengurangi kerusakan lingkungan (Hasan, 2015).

Wisatawan (stakeholders) di destinasi pariwisata, memiliki peran krusial dalam menciptakan keseimbangan pembangunan yang terintegrasi. Perilaku

wisatawan yang tidak bertanggung jawab, seperti vandalisme, premanisme, kurang menghormati budaya dan tradisi setempat, serta ketidakpedulian terhadap lingkungan, masih menjadi isu dan permasalahan yang sering terjadi di berbagai destinasi pariwisata. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaku wisata untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku pariwisata agar lebih bertanggung jawab. Komitmen dari berbagai pihak terkait, diharapkan dapat diciptakan lingkungan pariwisata yang positif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi semua pemangku kepentingan (Prabawa, 2017).

Model pembangunan berkelanjutan didasarkan pada tiga pilar utama yang saling terkait, yaitu masyarakat (*society*). Ini berkaitan dengan peran masyarakat, tanggung jawab, interaksi sosial, perilaku masyarakat, dan kondisi sosial di suatu wilayah. Kedua, lingkungan (*environment*), melibatkan lingkungan alam, termasuk aspek fisik dan kelembagaan yang diciptakan oleh manusia untuk memanfaatkannya. Ketiga, ekonomi (*economy*), melibatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan, termasuk untuk memperoleh keuntungan. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam setiap tindakan pembangunan (Zaini dan Darmawanto, 2015).

Indikasi penurunan jumlah keanekaragaman hayati memiliki dampak langsung pada kebutuhan mendesak dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan serta pada aspek sosial ekonomi. Pembangunan yang tidak memperhatikan tahapan berfikir berorientasi jangka panjang dapat mengabaikan aspek lingkungan, sehingga memberikan dampak besar terhadap keberlanjutan lingkungan. Pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sebagai salah satu

indikator lingkungan yang sehat menjadi dasar untuk merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan (Khairina dkk., 2020).

Menurut Yulianto dkk. (2022) menyatakan bahwa kondisi pengunjung ekowisata mangrove di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan karena belum optimalnya perkembangan ekowisata mangrove tersebut. Penerapan strategi *green tourism* pada wisata mangrove di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, ada beberapa aspek baru yang dapat dieksplorasi. Pertama, fokus pada pemanfaatan strategi *green tourism* yang lebih spesifik untuk mengoptimalkan potensi ekowisata dengan tetap memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Kedua, pengintegrasian aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi untuk peningkatan manajemen sistem.

Menurut Wahyurini (2017) menyatakan bahwa pada umumnya penurunan minat pengunjung salah satunya adalah dengan kurangnya pemahaman masyarakat pesisir terhadap manfaat dan pengelolaan tanaman mangrove. Kurangnya pemahaman tersebut akan berdampak terhadap kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pengolahan hasil perikanan, pertambakan, pertanian dan pengelolaan yang tidak diperhatikan pertumbuhannya. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan, pemasaran dan pelestarian untuk keberlanjutan kelestarian alam dan meningkatkan pendapatan daerah dari adanya pengembangan komoditas lokal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan strategi *green tourism* pada ekowisata mangrove di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana dampak ekonomi dan sosial dari adanya penerapan *green*

tourism pada ekowisata mangrove di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penerapan strategi *green tourism* pada ekowisata mangrove di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui dampak ekonomi dan sosial dari adanya penerapan *green tourism* pada ekowisata mangrove di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat penting dalam konteks pelestarian lingkungan dan pengembangan ekowisata di Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Dengan menerapkan model *green tourism* pada ekowisata mangrove, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan serta meningkatkan pendapatan personal, organisasional, dan regional. Hasil penelitian akan memberikan pandangan mendalam tentang keadaan ekowisata mangrove, strategi *green tourism* yang diterapkan, dan dampak ekonomi serta sosial dari penerapan *green tourism* di Desa Lembung. Manfaatnya mencakup panduan praktis untuk pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan dan berdampak positif secara ekonomi bagi masyarakat setempat.